

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah salah satu aspek utama dalam kehidupan politik sebuah negara demokratis, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah partisipasi politik yang merata, di mana seluruh warga negara, termasuk perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Pada kenyataannya, di berbagai negara termasuk Indonesia, perempuan seringkali menghadapi tantangan dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam setiap pemilu, partisipasi politik yang aktif dari seluruh warga negara sangat penting untuk menjamin representasi yang adil dan hasil yang demokratis. Namun, sejarah politik selama bertahun-tahun telah menunjukkan ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik, di mana peran perempuan seringkali terpinggirkan. Hal ini berlaku baik dalam pemilu lokal, nasional, maupun internasional (Suwandi, 2022).

Pemilihan Kota Bandung sebagai lokasi penelitian dapat dikarenakan keunikannya sebagai kota dengan perkembangan media sosial yang pesat dan dinamika politik lokal yang khas. Kota Bandung memiliki karakteristik yang unik dalam hal demografi, budaya, dan ekonomi, yang mana dalam keterlibatan perempuan pada konteks lokal dapat memberikan pemahaman tentang hambatan serta peluang keterlibatan perempuan dalam politik di Kota Bandung. Meskipun penelitian ini fokus pada Kota Bandung, hasilnya dapat memberikan wawasan yang dapat digeneralisasi atau diterapkan pada konteks kota-kota lain dengan karakteristik serupa. Ini memberikan nilai tambah karena temuan dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik perempuan di tingkat lokal. Kota Bandung dapat dianggap sebagai representasi dari beragam masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian di kota ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial

dapat berperan dalam meningkatkan inklusivitas dan partisipasi politik perempuan dalam masyarakat yang heterogen.

Keterwakilan perempuan diranah politik terutama di Kota Bandung masih jauh dari apa yang tertera dalam undang-undang pemilu. Adanya ketersediaan kuota 30 persen bagi perempuan di parlemen masih belum juga terpenuhi. Jika kita mengacu pada kesetaraan gender seharusnya kuota tersebut ialah sebanyak 50 persen. Dimana Peran Perempuan sebagai keterwakilannya di DPRD Kota Bandung masih minim dari jumlah kursi yang tersedia. Disamping itu rupanya masih banyak partai-partai politik di Kota Bandung yang miskin perempuan, jikalau adapun nyatanya mereka masih belum mempunyai kemampuan yang layak untuk dipilih. Namun sebaliknya, ada pula perempuan yang dirasa mampu dan telah memenuhi syarat sebagai wakil rakyat, akan tetapi kebanyakan dari mereka enggan untuk dicalonkan (DPRD Kota Bandung, 2023).

Data yang didapat pada website resmi DPRD Kota Bandung, saat ini jumlah politikus di DPRD Kota Bandung hanya sebanyak 9 (Sembilan) orang atau sekitar 18 (delapan belas) persen saja, sedangkan untuk mencapai kuota tersebut dibutuhkan sebanyak 12 (dua belas) persen lagi (DPRD Kota Bandung,2023). Nama-nama tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1
Anggota DPRD Perempuan di Kota Bandung Tahun 2023

Daerah Pemilihan	Nama Anggota	Lokasi Dapil
1	Rieke Suryaningsih,SH. Siti Marfuah,SS,S.Pd,M.Pd.	Cicendo,Sukajadi,Andir,Sukasari
2	Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I,M.Sos.	Bandung Wetan, Cibeunying Kidul,Sumur Bandung, Coblong, Cidadap,Cibeunying Kaler

3	N. Wina Sariningsih,SE	Kiaracondong,Batununggal, Lengkong
4	Hj. Siti Nurjanah, SS., Drg. Susi Sulastri	Ujung Berung,Antapani, Arcamanik, Mandalajati,Cibiru, Cinambo, Panyileukan
5	Nunung Nurasiah,S.Pd., Dr. Rini Ayu Susanti,SE.,M.Pd.	Buahbatu, Rancasari, Regol, Bandung Kidul, Gedebage
6	Drg. Maya Himawati	Babakan Ciparay ,Astana Anyar, Bojongloa Kaler, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul

Melihat data pada tabel 1, Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD sangatlah penting bagi Kota Bandung, sedangkan melihat jumlah penduduk perempuan di Kota Bandung saat ini didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 50,53 persen dengan data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil, 2023).

Ketika jumlah keterwakilan perempuan dalam organisasi kurang dari 15 persen, maka penanganan terkait isu-isu gender akan semakin terabaikan. Adanya peminggiran hak perempuan di Indonesia dapat terjadi karena adanya sistem gender yang patriarkis dengan stigma bahwa perempuan cukup berada dalam posisi domestik saja (Alfiyani, 2022).

Media Sosial menurut pendapat Joyce Kasman Valenza adalah platform internet yang digunakan oleh individu untuk bisa berbagi komunikasi terus menerus secara langsung. Media sosial adalah salah satu perkembangan teknologi terpenting dalam dekade terakhir, yang telah mengubah lanskap politik secara signifikan. Pada awalnya, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan platform lainnya dirancang untuk memfasilitasi interaksi sosial, namun seiring berjalannya waktu, peran mereka dalam politik sudah semakin berkembang dan kuat (Valenza, 2014).

Dalam konteks partisipasi politik, media sosial membagikan platform yang memungkinkan individu dapat berpartisipasi, berinteraksi, serta menyuarakan

pendapat mereka dalam isu-isu politik. Perempuan, seperti halnya laki-laki, telah semakin aktif dalam menggunakan media sosial untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini memberikan kesempatan yang besar untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik. Adanya fenomena tersebut mendorong pertanyaan penting tentang peran dan fungsi media sosial dapat mendorong partisipasi politik perempuan dalam pemilu. Analisis mendalam terhadap penggunaan media sosial oleh perempuan dalam konteks politik dapat memberikan wawasan tentang bagaimana platform ini memengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik (Nurcholis, 2020).

Indonesia, sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, peran perempuan dalam politik masih memerlukan peningkatan. Meskipun sejumlah perempuan telah mencapai posisi politik yang tinggi, tetapi masih ada ruang untuk lebih banyak partisipasi perempuan di semua tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, memahami peran media sosial dalam mendorong partisipasi politik perempuan dalam pemilu sangat penting. Melalui analisis media sosial dan keterlibatan perempuan dalam politik, kita dapat mengeksplorasi sejauh mana platform media sosial dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tradisional yang dihadapi oleh perempuan dalam politik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam memfasilitasi partisipasi politik perempuan, kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses politik, memastikan representasi yang lebih seimbang, serta memperkuat demokrasi secara keseluruhan (Mukrimin, 2020).

Pentingnya partisipasi perempuan dalam politik yakni agar terciptanya demokrasi yang semakin kuat yang mana partisipasi perempuan di negara ini masih dirasa kurang meskipun sudah diberikan kuota sebanyak 30 persen di parlemen. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kemungkinan besar akan menciptakan kepemimpinan perempuan di berbagai aspek seperti keterampilan dalam menjaga perdamaian, mengatasi perubahan iklim, dan menangani pandemi sekalipun. Saat ini kesetaraan gender masih menjadi tantangan di dunia politik. Ketidaksetaraan gender kurang dilakukan secara penuh dalam demokrasi dan hak asasi manusia, penyebab dari rendahnya Partisipasi perempuan di bidang politik

disebabkan adanya kendala secara kultural, struktural, dan juga anggapan-anggapan lain yang bias gender. Pentingnya perempuan untuk berperan aktif dalam pemilu ialah untuk menjadi pemilih cerdas agar tercipta pemilu yang berkeadilan serta aktif melakukan pemantauan dengan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu yang teregistrasi (Novrizaldi, 2021).

Terlepas dari fakta bahwa media telah melakukan banyak hal untuk mendorong perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik, namun masih diketahui bahwa mereka telah ditolak dan menghadapi tantangan politik. Stereotip gender, kurangnya keterwakilan, sensasionalisme dan hal-hal kecil, hambatan terhadap akses dan keterwakilan, dan kesadaran akan kepentingan perempuan dalam politik adalah beberapa masalah yang dihadapi. Salah satu isu yang sering muncul di media adalah stereotip gender. Stereotip ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam politik. Jika media meremehkan perempuan, tidak memahami politik, atau hanya mendukung laki-laki dalam politik, hal ini dapat menghambat partisipasi politik perempuan karena mereka merasa tidak dipercaya dan tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat (Mukrimin, 2020).

Minimnya partisipasi perempuan dalam media dapat menyebabkan kurangnya isu-isu politik terkait perempuan itu sendiri, sehingga masyarakat akan lebih sedikit menerima informasi mengenai partisipasi perempuan dibandingkan sebelumnya. Hal ini akan mengakibatkan perempuan kurang memiliki motivasi dan minat untuk berpartisipasi dalam politik. Peristiwa ini menyebabkan keterwakilan dan pengakuan terhadap kepentingan perempuan dalam politik menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan. Saat kepentingan perempuan tidak dipertimbangkan dalam keputusan politik, perempuan akan merasa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menyebabkan perempuan tidak tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Perempuan kurang mendapat perhatian media daripada laki-laki, seperti yang terlihat pada pemilihan presiden 2019. Isu-isu perempuan seperti hak-hak reproduksi dan kekerasan, serta isu gender dan ketidaksetaraan gender, seringkali diremehkan atau dianggap kurang penting. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan pengakuan terhadap

kepentingan perempuan dalam politik, yang dapat mengurangi keinginan mereka untuk terlibat dalam proses politik. (Gunawan, 2021).

Media sosial memiliki peran penting dalam politik perempuan dengan menyediakan platform yang memfasilitasi partisipasi politik, meningkatkan visibilitas, memperjuangkan isu-isu perempuan, dan mengatasi stereotip gender. Perempuan politik dapat memanfaatkan media sosial sebagai platform dalam Penggalangan dana, mengatasi hambatan gender, dan meningkatkan partisipasi pemilih perempuan. Peran media sosial dalam politik perempuan telah memberikan dampak positif dalam membuka pintu untuk perempuan terlibat dalam proses politik, mengatasi hambatan-hambatan gender, dan memperjuangkan isu-isu perempuan. Namun, tantangan seperti pelecehan online juga perlu diatasi untuk memastikan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan di media sosial (Musdalifah,2020).

Dengan adanya upaya yang dilakukan media sosial terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, media sosial dapat berperan aktif dengan menghilangkan berbagai bentuk stereotipe negatif serta dapat memastikan adanya peningkatan kehadiran perempuan di media sosial guna memberikan perhatian adanya peran aktif mereka di kancah politik. Selain itu media sosial harus lebih selektif dalam menyiarkan berita dengan memastikan perempuan bisa didengar pada ruang politik bukan hanya fokus terhadap konflik pribadi ataupun penampilan fisik belaka. Media sosial dapat memberikan tempat bagi perempuan untuk dapat menyalurkan pendapat atau aspirasinya terhadap fenomena politik yang terjadi saat ini dengan melibatkan mereka dalam diskusi, wawancara, konsultasi atau pemberitaan berbagai peristiwa politik sehingga dapat menarik perhatian masyarakat terhadap suaranya (Umari,2020).

Seperti yang dilakukan oleh beberapa caleg pada pemilu tahun 2019 lalu di Banda Aceh yang mayoritas beragama muslim, caleg perempuan memanfaatkan media sosial untuk memperkuat citra mereka terutama terkait kereligiusannya. Selama periode kampanye tersebut banyak kandidat yang memanfaatkan media sosial untuk memperlihatkan citra ketakwaan mereka dengan menggunakan pendekatan hukum Syariah yang secara khusus guna membawa perubahan sosial

serta mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Dengan begitu maka dapat menunjukkan bahwa representasi diri yang religius di media sosial berhasil meningkatkan jumlah elektabilitas mereka dan juga mendukung posisi perempuan dalam politik (Khairunnas, 2022).

Di berbagai negara yang mayoritas beragama muslim, media yang tradisional cenderung membuat sebuah pandangan bahwa politik tidak akan menguntungkan bagi perempuan akan tetapi dengan adanya media sosial yang lebih modern, hal ini sudah menjadi sarana alternatif bagi para perempuan dengan adanya media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan di berbagai daerah hal ini memperlihatkan bahwa media sosial bisa memberikan peluang sebagai bentuk mempromosikan diri mereka dalam memenangkan pemilu (Khairunnas, 2022).

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan menyajikannya kedalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang diberi judul: **Peran Media Sosial dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu: Analisis Media Sosial dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kota Bandung.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran media sosial dapat menarik partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan perempuan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam isu-isu politik?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peluang dan dampak penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum, dengan fokus pada peningkatan keterlibatan mereka dalam proses politik.

2. Memberikan rekomendasi tentang cara media sosial dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan dan Partisipasi mereka dalam isu-isu politik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis tentang keterlibatan politik, khususnya dalam konteks partisipasi politik perempuan serta dapat menyumbangkan wawasan baru tentang bagaimana peran media sosial dalam keterlibatan politik perempuan.
2. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan disiplin ilmu politik terkait media sosial dalam memahami peran media sosial dan dampaknya terhadap politik perempuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Pengembangan Strategi Politik: Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kandidat politik, partai politik, dan kampanye politik untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan media sosial sebagai pendukung partisipasi politik perempuan.
2. Pengembangan Kebijakan Publik: Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan publik yang mendukung keterlibatan politik perempuan melalui media sosial dan untuk mengatasi isu-isu tertentu yang diidentifikasi dalam penelitian.
3. Pemberdayaan Perempuan: Dengan memahami dampak media sosial pada partisipasi politik perempuan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberdayakan perempuan dalam politik dengan memberikan pelatihan, dukungan, dan pendidikan yang sesuai.
4. Advokasi dan Kampanye: Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi non-pemerintah dan aktivis untuk mengadvokasi hak dan

partisipasi politik perempuan, serta untuk merancang kampanye yang lebih efektif dalam mencapai tujuan ini.

1.5. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pemikiran yang dibuat untuk memberikan struktur logis dan sistematis guna membantu peneliti dalam mengorganisir ide dan konsep yang terlibat pada penelitian. Berikut konsep kerangka pemikiran terkait bagaimana peran media sosial dalam mendorong partisipasi politik perempuan pada pemilu dengan analisis media sosial dan keterlibatan perempuan dalam politik di Kota Bandung:

Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran

Fenomena

Minimnya keterwakilan perempuan di Kota Bandung menyebabkan kurangnya pembahasan terkait isu-isu politik perempuan. Salah satu penyebab peristiwa tersebut ialah rendahnya Partisipasi Perempuan dalam politik. Pentingnya sosok motivator terutama di media sosial dapat menjadi alternatif bagi terciptanya peningkatan Partisipasi politik perempuan terutama dalam pemilihan umum.

